

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis alasan mengapa Pemerintahan Amerika Serikat melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba di tahun 2015. Hasil analisis dari penelitian ini menemukan bahwa penyebab perubahan kebijakan dikarenakan adanya doktrin dari Presiden Barack Obama dalam merekonseptualisasi isu konflik Kuba, lalu peran DoS dalam merealisasikan kebijakan normalisasi hubungan diplomatik, peran Paus Fransiscus dalam menginisiasi pertemuan antara kedua perwakilan negara di Vatikan, ancaman boikot pertemuan KTT Amerika oleh negara-negara anggota OAS sekaligus mewadahi pertemuan bersejarah antara Pemerintahan Amerika Serikat dan Pemerintahan Kuba, dimana untuk pertama kalinya semenjak tahun 1961, dan yang terakhir adanya perubahan yang dilakukan oleh Raul Castro dalam pemerintahannya yang dimulai secara resmi pada tahun 2008 untuk mereformasi kebijakan dan cenderung kooperatif dalam membicarakan perdamaian dengan Amerika Serikat.

Dari hasil analisis dalam penelitian ini yang menjadi penyebab utama dari alasan pemerintahan Amerika Serikat melakukan normalisasi dengan Kuba di tahun 2015 adalah adanya doktrin dari Pemerintahan Barack Obama dimana lebih mengutamakan penggunaan *soft power* (diplomasi) dalam menyelesaikan permasalahan isu Kuba. Kemudian Barack Obama percaya bahwa kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya tidak layak lagi untuk diterapkan saat ini, karena kebijakan tersebut tidak bisa mewujudkan

kepentingan Amerika Serikat atas Kuba, yaitu menginginkan Kuba kembali menerapkan rezim demokrasi dan mengembalikan aset dan properti yang telah dinasionalisasi. Sehingga Barack Obama percaya bahwa dengan pendekatan ini, bisa membuka akses promosi demokrasi ke Kuba tanpa menggunakan sanksi ekonomi dan jalur militeristik.

## 5.2. Saran

Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan konsep *foreign policy change* dari Charles F. Hermann memiliki kendala dikarenakan banyaknya aktor yang terlibat dan dianalisis. Dari tingkat individu, kelompok, dan juga pada level sistem, sehingga peneliti menyarankan untuk menggunakan konsep alternatif lain dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri misalnya dilihat pada aktor domestik atau aktor eksternal saja. Kemudian dalam penelitian ini ditemukan bahwa meskipun kebijakan normalisasi secara resmi terealisasi pada tanggal 25 Juli 2015, namun permasalahan masih tetap berlanjut seperti kebijakan embargo tetap berlaku terhadap Kuba dan juga status Teluk Guantanamo masih dikuasai Amerika Serikat. Maka dari itu, peneliti berharap ada penelitian lain yang akan menganalisis bagaimana kebijakan Pemerintahan Amerika Serikat di Era Pemerintahan Donald Trump dalam isu kebijakan embargo dan status Teluk Guantanamo.

